

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI BANDAR LAMPUNG

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama informan : Syamsul Rahman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Bandar Lampung
Waktu Wawancara : Kamis, 28 Maret 2013



Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah mendefenisikan kebijakan terkait fungsional jalan dalam mengatasi kemacetan di Bandar Lampung?

Jawaban : ”Kebijakan dalam hal ini merupakan langkah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum yang diperintahkan oleh Walikota yaitu pengadaan pelebaran jalan dengan cara memanfaatkan dan memindahkan trotoar ke atas drainase hal tersebut bertujuan untuk menambah satu laju kendaraan yang dapat menciptakan kondisi ketertiban lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, demi kepentingan masyarakat atau publik”.

2. Apakah ada bukti masalah yang dapat menunjukkan bahwa di Bandar Lampung terjadi kemacetan sehingga alternatif pelebaran jalan protokol ini dibuat?

Jawaban :”Bukti kemacetan lalu lintas adalah padatnya kendaraan pada jam-jam puncak yaitu pada jam pulang kantor, jam pulang anak sekolah, dan berangkat sekolah yaitu pukul 07.00-08.00 WIB dan 16.00-18.00 dan juga karena meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Bandar Lampung sehingga lebar ruas jalan terbatas untuk menampung padatnya kendaraan yang melintas di jalan protokol”.

3. Apakah ada alternatif kebijakan pembangunan jalan yang lain dari Pemerintah Kota yang dirumuskan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung?

Jawaban:” Kita mengupayakan solusi untuk mengatasi kemacetan di Bandar Lampung dengan berbagai program dan alternatif yaitu memperlebar jalan alternatif seperti jalan Untung Suropati, Jalan Nusantara, Jalan Sultan Agung, pembangunan fly over. Pembangunan jalan underpass, pembangunan jalan lingkar”.

4. Bagaimana Kondisi Sumber daya dan prasarana yang ada dalam rencana pembangunan pelebaran jalan protokol Kota Bandar Lampung?

Jawaban : ”Sumber daya masih kurang, masih membutuhkan tenaga kerja yang profesional lagi apalagi ketika proyek berjalan. Prasarana yang dibutuhkan dalam program pemeliharaan rutin jalan masih kurang yaitu AMP, alat pembuat aspal, sehingga masih dibutuhkan bantuan dari tender”.

5. Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung?

Jawaban : ”Kebijakan untuk mengatasi kemacetan terkait pembangunan jalan didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan urusan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan asa ekonomi dan tugas pembantuan yang ditanggung jawankan kepada Walikota”.

6. Apa yang menjadi tujuan dan target yang telah ditentukan terkait alternatif kebijakan pelebaran jalan protokol oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan?

Jawaban : ”Target berdasarkan perintah Walikota bahwa beliau menghendaki tahun 2014 semua jalan di Bandar Lampung harus bagus, tetapi masih mengalami kendala dalam target yaitu tahun umur jalan yang harus memerlukan program pemeliharaan jalan semua program ditujukan untuk memberikan pelayanan yang baik dalam penggunaan jalan dalam mengurangi kemacetan”.

7. Apakah ada alternatif kebijakan tentang pembangunan jalan yang ditujukan mengatasi kemacetan? Dan apa alternatif terbaik yang diprioritaskan?

Jawaban : ”Langkah yang ditempuh adalah dengan pelebaran jalan pada Jl. Pemuda, Jl. P. Antasari, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Sultan Agung, mengembangkan jalan alternatif, membangun jalan layang,dengan konsep pemeliharaan jalan konsep jangka pendek, menengah, dan jangka panjang selain itu juga didukung dengan kebijakan pembuatan BRT yang mendukung mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung. Alternatif terbaiknya yaitu dengan memprioritaskan pelebaran jalan protokol Kota Bandar Lampung karena jalan tersebut merupakan pusat mobilisasi masyarakat pada umumnya dalam kegiatannya masing-masing”

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI BANDAR LAMPUNG

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama informan : Bambang Yustiawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengendalian Dinas
Pekerjaan Umum Kota
Bandar Lampung
Waktu Wawancara : Kamis, 28 Maret 2013



Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah mendefenisikan kebijakan terkait fungsional jalan dalam mengatasi kemacetan di Bandar Lampung?

Jawaban : "Kebijakan mengatasi kemacetan dalam pembangunan jalan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yaitu memberikan pelayanan jalan yang baik dengan memperbaiki jalan yang rusak. Dengan jalan yang baik akan dapat meningkatkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan melaksanakan urusan Pemerintahan kota di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan asas pembantuan".

2. Apakah ada bukti masalah yang dapat menunjukkan bahwa di Bandar Lampung terjadi kemacetan sehingga alternatif pelebaran jalan protokol ini dibuat?

Jawaban : "Ya sekarang ini terlihat banyak kemacetan, seperti contohnya di Jl. Kartini dan Jl. Z.A Pagar Alam setiap jam sibuk mengalami kemacetan sehingga perlu diadakan pelebaran jalan dan juga adanya kawasan pertokoan dan pusat perbelanjaan seperti di kawasan Bandar Lampung Plaza (Jl. Raden Intan), Mall Kartini (Jl. Kartini) yang notabene jalan tersebut merupakan jalan protokol Kota Bandar Lampung dan juga dengan adanya pembangunan Mall di Jl. Teuku Umar-Jl. Sultan Agung" maka akan diadakan pelebaran jalan pada Jl. Sultan Agung untuk mengurangi kemacetan nantinya

3. Apakah ada alternatif kebijakan pembangunan jalan yang lain dari Pemerintah Kota yang dirumuskan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung?

Jawaban: "Ya ada, saat ini pelebaran jalan dari Pasar Koga sampai Depan Ramayana ditujukan oleh Pemerintah Provinsi, pengembangan jalan alternatif seperti jalan Sudirman. Pembukaan jalan alternatif yang kecil dilebarkan dan diperbaiki yaitu jalan Depan Kampus Unila. Jalan Urip Sumoharjo sampai ke Jalan Soekarno Hatta dengan cara memanfaatkan lahan warga".

4. Bagaimana Kondisi Sumber daya dan prasarana yang ada dalam rencana pembangunan pelebaran jalan protokol Kota Bandar Lampung?

Jawaban : "Sumber daya tergantung anggaran, dengan alternatif peminjaman uang ditujukan untuk pembangunan fly over dan pembangunan pelebaran protokol. Prasarana yang dibutuhkan cukup yaitu peralatan rutin."

5. Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung?

Jawaban : "Pemerintah Kota Bandar Lampung sebenarnya sudah menetapkan produk yuridis terkait dengan daftar induk jaringan jalan kota Bandar Lampung terkait kemacetan lalu lintas yaitu dituangkan dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 328/02.2/HK/2008 tentang Daftar Induk Jaringan Jalan Kota Bandar Lampung. Namun permasalahannya adalah apakah produk keputusan yang ditetapkan tersebut sudah terlaksana secara efektif, apakah produk keputusan tersebut sudah meng-*cover* semua permasalahan jalan di Kota Bandar Lampung terkait masalah prioritas jalan dalam mengatasi kemacetan yang semakin kompleks dan multidimensional saat ini".

6. Apa yang menjadi tujuan dan target yang telah ditentukan terkait alternatif kebijakan pelebaran jalan protokol oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan?

Jawaban : "Target berdasarkan ditujukan dengan kualitas jalan dengan didukung dengan program pemeliharaan jalan rutin. Kualitas jalan yang baik akan memberi pelayanan yang baik juga sehingga kemacetan teratasi".

7. Apakah ada alternatif kebijakan tentang pembangunan jalan yang ditujukan mengatasi kemacetan? Dan apa alternatif terbaik yang diprioritaskan?

Jawaban: "Langkah yang ditempuh adalah dengan pelebaran jalan, mengembangkan jalan alternatif. "Langkah yang ditempuh adalah dengan pelebaran jalan, mengembangkan jalan alternatif untuk mengurangi titik kemacetan di pusat kota, selain itu juga meningkatkan program pemeliharaan jalan yang ditujukan untuk mendukung kualitas prioritas jalan dalam

efektivitas penggunaannya. Langkah-langkahnya didahului dengan penyusunan rencana-rencana strategis oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai organisasi pelaksana.”

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI BANDAR LAMPUNG

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama informan : Barlian Masyur
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua DPRD Komisi C
Kota Bandar Lampung
Waktu Wawancara : Selasa, 2 April 2013



Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah mendefenisikan kebijakan terkait fungsional jalan dalam mengatasi kemacetan di Bandar Lampung?

Jawaban: "Kebijakan pada dasarnya dirumuskan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Kebijakan disini untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kemacetan yang selama ini menjadi ciri kota metropolis. Dari semua masalah yang dihadapi oleh Pemda dibahas dengan DPRD sesuai UU No 32 Tahun 2004 dimana pemerintahan Walikota dengan DPRD menjalankan fungsi pemerintahan dengan menyusun pembahasan pembiayaan, perumusan dalam pelebaran jalan protokol Kota Bandar Lampung".

2. Apakah ada bukti masalah yang dapat menunjukkan bahwa di Bandar Lampung terjadi kemacetan?

Jawaban: "Kemacetan terjadi pada saat jam kerja, jam anak sekolah pulang, dan kegiatan rutin pada jam 07.00 sampai jam 09.00 dan jam 02.00 sampai

jam 05.00.maka diperlukan terobosan kerjasama responsif dari Pemkot dan DPRD”.

3. Apakah ada alternatif kebijakan lain yang dirumuskan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung terkait fungsional jalan?

Jawaban:”Ya, dengan rencana pembuatan fly over di jalan Zainal abidin, Pagar Alam, dengan harapan dapat mewujudkan Bandar Lampung sebagai kota metropolitan, dan hal ini dibahas dalam RPJMD Kota Bandar Lampung sebagai suatu hal program dari otonomi daerah”.

4. Adakah evaluasi dasar hukum atau alternatif kebijakan yang lain dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung?

Jawaban:”Ada, dasar hukumnya adalah Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 328/02.2/HK/2008 dimana dibahas mengenai pesatnya perkembangan dan pembangunan Kota Bandar Lampung dimana infrastruktur jalan merupakan bagian dari pembangunan Kota Bandar Lampung secara keseluruhan”.

5. Apakah peraturan-peraturan mengenai ketetapan pembangunan pelebaran jalan protokol telah menjelaskan siapa yang mengambil tindakan, bagaimana dan kapan terkait dengan alternatif kebijakan pembangunan jalan protokol?

Jawaban: ”Walikota bersama dengan satuan kerjanya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dengan berbagai analisa ditujukan untuk pembangunan terarah, diperlukan induk rencana pembangunan agar arah pembangunan terarah sesuai dengan PRJMD Kota Bandar Lampung”.

6. Apa yang menjadi tujuan dan target yang telah ditentukan terkait alternatif kebijakan pembangunan pelebaran jalan protokl Kota Bandar Lampung?

Jawaban:”Tujuannya dikontribusikan khusus untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandar Lampung dan terkait mengenai pola peningkatan jalan Kota Bandar Lampung dalam RPJMD Kota Bandar Lampung”.

7. Apakah alternatif pembangunan jalan protokol Kota Bandar Lampung telah dipertimbangkan secara sistematis dalam hal kemungkinan biaya dan efektifitasnya?

Jawaban:”Ya harus, semua pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan didukung oleh skala prioritas yang berpatokan dengan RPJMD sebagai pola kebijakan. Perlu peningkatan koordinasi antara satuan kerja yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan”.

8. Bagaimanakah kriteria yang relevan untuk merekomendasikan alternatif kebijakan pembangunan pelebaran jalan protokol Kota Bandar Lampung?

Jawaban:”Kemacetan lalu lintas disebabkan berbagai faktor yang kompleks, multidimensional, dan saling berhubungan, sehingga pembahasan mengenai masalah ini, tidak dapat dilakukan secara terpisah dan parsial, tetapi dilakukan secara menyeluruh dan utuh. Alternatifnya yaitu dengan pembangunan fly over karena keterbatasan lahan jalan. Ditinjau dari segi pembiayaan. Pelebaran jalan juga didukung untuk meningkatkan pelayanan transportasi jalan”.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI BANDAR LAMPUNG

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama informan : Suwondo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Anggota DPRD Komisi C
Kota Bandar Lampung
Waktu Wawancara : Selasa, 2 April 2013



Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah mendefinisikan kebijakan terkait fungsional jalan dalam mengatasi kemacetan di Bandar Lampung?

Jawaban: ”antara volume kendaraan dan badan jalan harus seimbang. Sekarang ini jumlah kendaraan di Bandar Lampung berkembang pesat sehingga daya tampung ruas jalan tidak dapat menampung jumlah kendaraan pada jam sibuk. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kemacetan yang memacu kepada penggunaan jalan yang tidak efektif. Kemacetan di Kota Bandar Lampung hanya terjadi pada jam sibuk saja”

2. Apakah ada bukti masalah yang dapat menunjukkan bahwa di Bandar Lampung terjadi kemacetan?

Jawaban: ”Kemacetan terjadi pada saat jam kerja, jam anak sekolah pulang, dan kegiatan rutin pada jam 07.00 sampai jam 09.00 dan jam 02.00 sampai

jam 05.00 pada saat jam-jam tersebut terjadi penumpukan kendaraan yang mengakibatkan daya tampung ruas jalan sangat kurang untuk menampung padatnya kendaraan pada jam sibuk”.

3. Apakah ada alternatif kebijakan lain yang dirumuskan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung terkait fungsional jalan?

Jawaban: ”Dengan rencana pembuatan fly over di jalan Zainal abidin, Pagar Alam, dan juga membangun drainase untuk mengatasi banjir di jalan protokol kota Bandar Lampung, perbaikan jalan alternatif seperti jalan Nusantara, Jalan Tamin, Jalan Pramuka”.

4. Adakah evaluasi dasar hukum atau alternatif kebijakan yang lain dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung?

Jawaban : ”Dasar hukumnya adalah UU No 22 Tahun 2009 tentang jalan yang mendukung dengan peningkatan prioritas jalan” dan ditujukan untuk mengatasi kemacetan yang perlu diadakan peninjauan kembali adalah pelebaran jalan-jalan protokol yaitu pada Jl. Kartini, Jl. Raden Intan, Jl.Jenderal Soedirman, Jl. Imam Bonjol, Jl. Z.A Pagar Alam. Tepatnya sekitar Jl. Raden Intan, Jl. Kartini, dan Jl. Teuku Umar. Dipengaruhi juga perputaran jalan hanya ada pada depan Makam Pahlawan. Dua titik tersebut menyebabkan kemacetan karena terjadinya pemusatan penumpukan kendaraan. Kebijakan memberikan pagar jalan pada Jl. Raden Intan (depan Ramayana)

5. jalan protokol telah menjelaskan siapa yang mengambil tindakan, bagaimana dan kapan terkait dengan alternatif kebijakan pembangunan jalan protokol?

Jawaban:”Walikota bersama dengan satuan kerjanya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dengan berbagai analisa ditujukan untuk pembangunan terarah, diperlukan induk rencana pembangunan agar arah pembangunan terarah sesuai dengan RPJMD Kota Bandar Lampung.”

6. Apakah alternatif pembangunan jalan protokol Kota Bandar Lampung telah dipertimbangkan secara sistematis dalam hal kemungkinan biaya dan efektifitasnya?

Jawaban:”Semua pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan dibahas dalam Musrenbang, hasil pembahasan pada Musrenbang akan dikembangkan sesuai dengan daya keuangan APBD Kota Bandar Lampung, diutamakan alternatif kebijakan yang menyangkut kebutuhan sosial, mendesak, dan mendasar”

7. Apa yang menjadi tujuan dan target yang telah ditentukan terkait alternatif kebijakan pelebaran jalan protokol?

Jawaban: Diharapkan target pertama mengurangi kemacetan. Dan juga perbaikan jalur kereta api, pembuatan under pass yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Kota Bandar Lampung.

8. Bagaimanakah kriteria yang relevan untuk merekomendasikan alternatif kebijakan pembangunan pelebaran jalan protokol Kota Bandar Lampung?

Jawaban:”Dengan memperhatikan tata ruang terkait pelebaran jalan protokol Kota Bandar Lampung,, memperhatikan drainase pada batas garis jalan, program pelebaran jalan protokol sesuai dengan Renstra Kota (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Pelebaran jalan protokol dapat menjawab permasalahan kemacetan yang ada di Kota Bandar Lampung, dan hal ini

diusulkan oleh banyak pihak. Pelebaran jalan protokol disesuaikan dengan kondisi obyektif, dana, dan aspek teknis dan permasalahan kota”.